

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DEFISIT ANGGARAN MELALUI UTANG PEMERINTAH

by Hadi Sutrisno

Submission date: 31-Jul-2022 01:17AM (UTC-0400)

Submission ID: 1877074153

File name: IJAKAN_PENGELOLAAN_DEFISIT_ANGGARAN_MELALUI_UTANG_PEMERINTAH.pdf (560.64K)

Word count: 3720

Character count: 24321

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DEFISIT ANGGARAN MELALUI UTANG PEMERINTAH

Hadi Sutrisno

Hadiundar775@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Darul 'Ulum

ABSTRACT

Kebijakan ekonomi pemerintah berkaitan dengan anggaran menjadi sangat penting sebab akan menentukan sebuah perekonomian. Kebijakan ekonomi yang ekspansif mendorong untuk melakukan kebijakan defisit anggaran untuk memicu laju pertumbuhan. Permasalahan muncul dari mana mendapatkan pembiayaannya. Pembiayaan dari luar negeri yang berlebihan akan menambah beban berupa utang dan bunganya untuk generasi mendatang. Penciptaan uang akan memicu laju inflasi yang berimbas pada penurunan perekonomian. Penjualan obligasi menjadi perhatian karena walaupun menambah utang pemerintah di satu sisi tetapi di sisi lain juga akan meningkatkan asset perekonomian netto, yaitu meningkatnya jumlah tagihan masyarakat terhadap pemerintah yang berarti meningkatkan kekayaannya. Hal ini juga akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pemerintah.

Defisit yang berlebihan juga perlu diwaspadai karena akan memperkecil proporsi hutang yang didapat untuk dialokasikan pada peningkatan output karena sebagian besar dialokasikan untuk melakukan pembayaran hutang sebelumnya. Semakin besar proporsi anggaran untuk peningkatan output akan menyebabkan semakin besar pula penerimaan, sehingga proporsi utang terhadap penerimaan semakin mengecil, sehingga diharapkan defisit anggaran semakin terjaga.

Kata Kunci: Defisit Anggaran, Utang Luar Negeri, Obligasi Pemerintah

ABSTRACT

The Policy of government economics relate to budget become important, cause will determine economics condition. The Policy of ekspansif economics conduct to the policy of budget deficit to trigger growth rate. Problems emerge where from getting its defrayal. Defrayal from the abundant of foreign loan will increase in the form of debt and interest for next generation. Creation of money will trigger higher inflation which induce to economic contractions . Government obligation become attention because although the adding of governmental debt one side but on the other also will improve nett of assets, meaning the increasing of social credit to government that improve its properties, and also will induce the increasing of government income.

The abundant of deficit also require to the alert because will decrease the proportion of loan allocation to increase output because most allocation for the payment of previous loan. The greater budget proportion to increase output will cause the greater income, so that proportion of loan to income progressively decreases, so the budget deficit is controlled.

Keyword: Deficit of Budget, Foreign Loan, Government Obligation

Pendahuluan

Pembahasan tentang anggaran pemerintah telah muncul sebagai masalah ekonomi makro yang penting. Suatu anggaran pemerintah terdiri dari besaran pengeluaran dan penerimaan

pemerintah. Dalam kondisi perekonomian tertentu, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diterapkan dapat dilihat dalam anggaran pemerintah tersebut, dan defisit anggaran adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yaitu kebijakan fiskal ekspansif.

Banyak orang merasa khawatir bahwa defisit anggaran dan hutang pemerintah yang semakin meningkat pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya inflasi ataupun instabilitas keuangan, atau memaksa kenaikan pajak dalam jumlah yang besar dan mendesak pengeluaran investasi. Hal yang sangat penting dalam membahas hutang pemerintah adalah apakah hutang pemerintah tersebut akan mencerminkan beban bagi generasi mendatang, dan apakah hutang pemerintah tersebut akan mencerminkan kekayaan neto perekonomian, dan jika benar apakah implikasi dari efek pembiayaan defisit anggaran.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Mekanisme Pembiayaan Anggaran Belanja

Anggaran pemerintah memiliki sifat struktural dan siklikal. Anggaran memiliki sifat struktural atau aktif, berarti anggaran tersebut ditentukan oleh kebijakan aktif dan beban (diskresioner) seperti penetapan tingkat pajak, jaminan sosial, dan belanja pemerintah untuk menghitung seberapa besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta kemungkinan defisit/surplus bila perekonomian beroperasi pada tingkat produksi potensial. Akan tetapi, sebagian besar dari anggaran bersifat siklikal atau pasif dimana ditentukan oleh keadaan siklus ekonomi, untuk menghitung dampak dari siklus ekonomi terhadap anggaran atau mengukur perubahan dalam penerimaan, pengeluaran, dan defisit/ surplus yang timbul karena perekonomian tidak beroperasi pada output potensialnya.

Konsep atau definisi defisit anggaran bervariasi. Perbedaan definisi yang diaplikasikan oleh berbagai penguasa fiskal maupun oleh para peneliti didasari oleh perbedaan metode pencatatan dan oleh perbedaan tujuan analisis dampak defisit anggaran terhadap berbagai sektor perekonomian. Definisi defisit secara konvensional, dapat dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Sementara itu, pengertian kedua adalah defisit moneter. Defisit moneter adalah selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok utang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan utang). Pengertian ketiga adalah defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Definisi yang terakhir adalah defisit primer. Defisit anggaran dapat dikelompokkan menjadi dua komponen. Kedua komponen itu adalah defisit primer dan komponen pembayaran bunga utang. Defisit primer didefinisikan sebagai selisih antara pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pembayaran bunga utang) dengan seluruh penerimaan pemerintah (tidak termasuk utang baru dan pembayaran cicilan utang). Pengelompokan komponen defisit anggaran itu dimaksudkan untuk melihat peranan beban utang dalam anggaran pemerintah. Jika beban utang pemerintah, suku bunga pinjaman, dan kurs mata uang semakin tinggi maka pembayaran bunga utang juga akan semakin tinggi, selanjutnya defisit anggaran cenderung semakin tinggi.

Para ahli ekonomi cenderung menghitung defisit anggaran negara itu bukan dari angka absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit anggaran negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila kita menghitung defisit anggaran negara sebagai persentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana untuk menutup defisit tersebut (David N, 1999, hal.446). Besarnya defisit ditentukan dalam persentase terhadap Produksi Domestik Bruto pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan menggunakan cara tersebut dapat diperoleh gambaran beban utang yang dimiliki pemerintah terhadap pendapatan nasional. Menurut PP No. 23 Tahun 2003, anggaran pemerintah dapat defisit tidak melebihi 3% dari produksi domestik bruto (PDB). Kecuali itu, dengan menghitung

besarnya persentase deficit anggaran negara terhadap PDB juga menggambarkan berapa tingkat defisit itu sudah membahayakan keadaan perekonomian.

Mekanisme pemerintah membiayai pengeluarannya, secara langsung sebagian besar pengeluarannya dibayar melalui cek yang ditarik dari bank sentral. Terlepas dari kenyataan bahwa cek tersebut ditarik dari bank di mana pihak swasta perorangan tidak mempunyai rekening, pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah tampaknya sama saja seperti pembayaran yang dilakukan oleh perorangan. Pemerintah harus mempunyai dana di dalam rekening bank tersebut yang memungkinkannya untuk menulis cek.

Departemen keuangan merupakan perwakilan pemerintah yang mengumpulkan penerimaan dan melakukan pembayaran bagi pemerintah. Rekening pemerintah di Bank Sentral dipegang dan dijalankan oleh Departemen Keuangan. Departemen Keuangan menerima bagian terbesar dari penerimaannya melalui pajak.

Apabila penerimaan tidak cukup untuk menutup pengeluarannya, dengan kata lain apabila terdapat defisit anggaran belanja, maka departemen keuangan harus meminjam. Dalam hal ini Departemen Keuangan dapat meminjam langsung ke Bank Sentral melalui penjualan surat berharganya, atau secara alternatif dapat menjual surat berharga kepada masyarakat.

Apabila Departemen Keuangan membiayai defisitnya dengan meminjam dari sektor swasta, lembaga tersebut ikut serta dalam pembiayaan lewat hutang. Apabila Departemen Keuangan meminjam dari bank Sentral untuk membiayai defisitnya, maka lembaga tersebut ikut serta dalam pembiayaan lewat penciptaan uang. Di samping itu juga dimungkinkan pemerintah dapat membiayai pengeluarannya melalui penjualan sejumlah aktiva seperti tanah atau bangunan maupun perusahaan yang dimilikinya.

Bila anggaran belanja tidak berimbang, maka Departemen Keuangan akan mengubah jumlah tagihan netto terhadapnya yang dipegang oleh sector swasta dan Bank Sentral. Tagihan tersebut mencakup surat berharga yang dijual Departemen Keuangan kepada sector swasta dan Bank Sentral, dan mencerminkan tagihan atas pembayaran bunga di kemudian hari. Total stok obligasi pemerintah atau tagihan terhadap pemerintah yang beredar merupakan hutang nasional atau pemerintah. Apabila anggaran belanja mengalami deficit, maka hutang pemerintah akan naik, jumlah tagihan terhadap departemen keuangan bertambah. Apabila anggaran belanja mengalami surplus, maka hutang nasional akan turun. Departemen Keuangan memperoleh penerimaan yang lebih besar daripada pengeluarannya, dapat menggunakan kelebihan itu untuk melunasi atau membeli kembali hutang yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Sebab-sebab Terjadinya Defisit Anggaran Negara

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran (Kunarjo,2001,hal.2) antarlain:

- a) Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Semuanya itu diperlukan biaya yang besar, dan diantaranya harus dilaksanakan oleh negara
- b) Upaya Peningkatan Daya Beli Masyarakat
Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan perkapita rendah, dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan

rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Apabila dibiarkan saja menurut mekanisme pasar, barang-barang itu pasti tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat dan mereka akan tetap terpuruk. Oleh karena itu, negara memerlukan pengeluaran untuk mensubsidi barang-barang tersebut agar masyarakat miskin bisa ikut menikmati.

c) **Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk mempertahankan kestabilan politik, persatuan dan kesatuan bangsa, negara harus mengeluarkan biaya untuk misalnya, pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Kegiatan itu misalnya dengan memberi subsidi kepada pelayaran kapal Perintis yang menghubungkan pulau-pulau yang terpencil, sehingga masyarakat mampu menjangkau wilayah-wilayah lain dengan biaya yang sesuai dengan kemampuannya.

d) **Melemahnya Nilai Tukar**

Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejala nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak.

e) **Realisasi yang Menyimpang dari Rencana**

Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan, proyek, atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada aitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, negara harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

f) **Pengeluaran Karena Inflasi**

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Anggaran negara yang telah tercantum terlalu rinci dalam dokumen anggaran (DIP, DIPP), pemimpin proyek sulit untuk bisa menyesuaikan apabila terjadi kenaikan harga barang yang melampaui harga standar. Untuk melaksanakan pembangunan proyek yang melampaui standar yang telah ditentukan, pemimpin proyek akan dipersalahkan oleh Badan Pengawas Keuangan, sebaliknya juga apabila pemimpin proyek terpaksa mengurangi volumenya. Akibatnya, negara terpaksa akan mengeluarkan dana untuk eskalasi dalam rangka menambah standar harga itu.

Dampak Defisit terhadap Perekonomian

Beberapa pendapat yang berbeda tentang dampak kebijakan defisit anggaran pemerintah terhadap perekonomian. *Pump-priming theory* menyatakan bahwa defisit anggaran pemerintah diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi nasional agar perekonomian

terhindar dari kondisi resesi yang berkepanjangan. Melalui kebijakan pembiayaan defisit anggaran pemerintah dimungkinkan tercipta lapangan kerja (*employment creation*). Jika lapangan kerja dapat diciptakan akan meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan agregat meningkat. Hal ini akan merangsang pengusaha untuk meningkatkan produksinya.

Kenaikan permintaan agregat dapat juga terjadi melalui peningkatan pengeluaran masyarakat. Pandangan ekonom Keynesian menyatakan bahwa kebijakan defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan pemotongan pajak menyebabkan wajib pajak merasa penghasilan setelah pajak meningkat. Peningkatan pendapatan setelah pajak ini akan direspon dengan melakukan pengeluaran yang lebih banyak. Kenaikan pengeluaran akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa dan ini akan mendorong aktivitas ekonomi.

Richardian equivalence hypothesis menyatakan bahwa defisit anggaran pemerintah tidak akan berpengaruh terhadap ekonomi makro. Hipotesis ini didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat memiliki asa nalar (*rational expectation*) terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Bagi masyarakat yang rasional, kebijakan pemerintah menempuh anggaran defisit dengan memotong pajak memberikan dampak kenaikan pendapatan setelah pajak untuk saat ini. Namun pada masa yang akan datang pemerintah perlu membayar cicilan dan bunga atas utang yang terakumulasi teraebut. Cara yang ditempuh oleh pemerintah biasanya dengan menaikkan pajak. Jadi penurunan pajak saat ini dipandang oleh konsumen hanya memberikan pendapatan sementara (*transitory income*) saja dan pada masa yang akan datang akan "diambil kembali" oleh pemerintah. Dengan demikian konsumen tidak akan meningkatkan pengeluarannya saat ini (Mankiw, 2007, hal 431).

Ekonom Klasik berpandangan bahwa defisit anggaran pemerintah dapat merugikan perekonomian. Defisit anggaran pemerintah dengan menurunkan tarif pajak akan meningkatkan suku bunga dan menurunkan investasi swasta. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan turun (*crowding-out*). Namun dalam penelitian Eisner (1989) pada perekonomian Amerika pada periode tahun 1956-1984 memperoleh bukti bahwa defisit anggaran pemerintah berpengaruh positif terhadap investasi domestik. Dengan kata lain, pada periode tersebut kebijakan defisit anggaran pemerintah mengakibatkan "*crowding-in*" bagi perekonomian.

Pengelolaan Defisit Anggaran

Dalam pengelolaan defisit anggaran, pokok perhatian kita pada dua komponen deficit anggaran belanja, yaitu *defisit primer atau defisit tanpa bunga dan pembayaran bunga* atas hutang pemerintah. Defisit (atau surplus) primer menyatakan seluruh pengeluaran pemerintah, kecuali pembayaran bunga, dikurangi dengan seluruh penerimaan pemerintah.

$$\text{Total Defisit} = \text{Defisit Primer} + \text{Pembayaran Bunga} \dots \dots \dots (1)$$

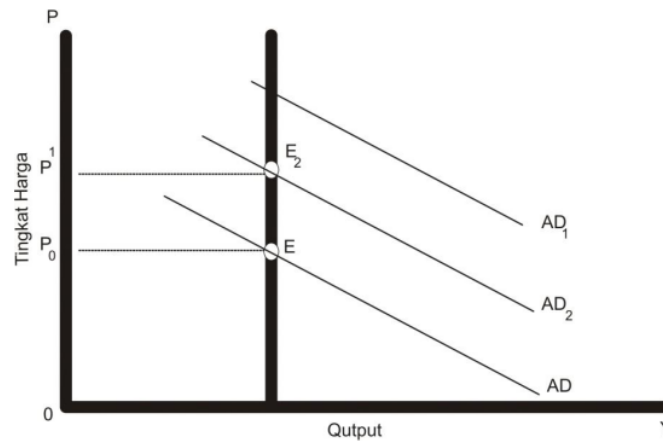
$$\text{Defisit Primer} = \text{Pengeluaran tanpa bunga} - \text{total Penerimaan} \dots \dots \dots (2).$$

Perbedaan antara kedua komponen tersebut menjelaskan peranan hutang pemerintah dalam anggaran belanja. Bunga harus dibayarkan kalau masih ada hutang yang belum dilunasi. Jika terdapat defisit primer dalam anggaran belanja, maka defisit anggaran belanja total akan terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan hutang pemerintah karena adanya defisit tersebut, dan pembayaran bunga akan naik karena pertumbuhan hutang pemerintah.

Hal menarik yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan pemotongan pajak, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat pada kurun waktu 1981-1983, tarif pajak dipotong sebesar 30% menurut proses tiga tahap, yang dikenal sebagai kebijakan pemotongan pajak Kemp-Roth. (Dornbusch, 1993, hal. 554). Jika kebijakan itu tidak dilakukan, maka pajak penghasilan sebagai persentase terhadap GNP akan naik dan defisit anggaran belanja tidak akan naik secara cepat. Walaupun semula kebijakan ini muncul berbagai pertentangan, tapi pernyataan yang diajukan oleh para ekonom sisi-penawaran "Pemotongan tariff pajak penghasilan akan

menaikkan penerimaan pajak” perlu ditelaah secara seksama. Mereka berpendapat bahwa pemotongan pajak penghasilan akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras, karena dengan jam kerja yang sama akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga orang tersebut akan bersedia menawarkan jam kerja yang lebih banyak. Dengan demikian akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, yang berakibat pada meningkatnya penerimaan pajak.

Pemotongan pajak itu diasumsikan bersifat sementara, dan deficit anggaran belanja dibiayai lewat penjualan hutang kepada sector swasta. Efek awal dari pemotongan pajak adalah pergeseran kurva permintaan agregat ke atas dari AD ke AD_1 . (Gambar 1).



Gambar 1: Defisit Sementara Yang Dibiayai Lewat Hutang.

Karena sektor swasta membeli obligasi selama periode defisit itu, maka stok obligasi pemerintah yang mereka kuasai menjadi lebih tinggi. Individu yang memegang obligasi pemerintah menganggap obligasi itu sebagai bagian dari kekayaan mereka. Dengan demikian akan tampak bahwa pada tingkat pendapatan tertentu, permintaan agregat harus naik apabila stok obligasi pemerintah naik, karena individu yang memegang obligasi itu memiliki kekayaan yang lebih tinggi. Kekayaan yang lebih tinggi itu akan menaikkan permintaan konsumsi. Begitu defisit itu kembali normal, efek kenaikan stok obligasi yang beredar akan menunjukkan permintaan agregat yang lebih tinggi. AD_1 akan bergeser kembali ke AD_2 , bukan ke AD. Terdapat kenaikan permanen pada tingkat harga dengan jumlah uang beredar nominal tertentu, suku bunga mengalami kenaikan.

Ada perbedaan mendasar antara pembiayaan lewat hutang dan pembayaran lewat penciptaan uang untuk deficit anggaran belanja jangka pendek tertentu. Pembiayaan defisit lewat penciptaan uang dalam jangka pendek cenderung mengurangi suku bunga dibandingkan dengan lewat hutang. Hal ini disebabkan pembiayaan lewat penciptaan uang akan menaikkan stok uang beredar nominal (menggeser ke atas kurva LM pada model IS-LM, sedangkan lewat hutang tidak. Dengan demikian maka dalam jangka pendek pembiayaan lewat hutang akan mengurangi tingkat investasi dibandingkan dengan pembiayaan lewat penciptaan uang.

Analisis Kebijakan Secara Empiris

Untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian berkaitan dengan APBN, bisa tercermin dari hasil penyusunan APBN dari waktu ke waktu. Berikut adalah hasil penyusunan APBN berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR:

Tabel 1
Kondisi APBN dari waktu ke waktu (2005-2010).

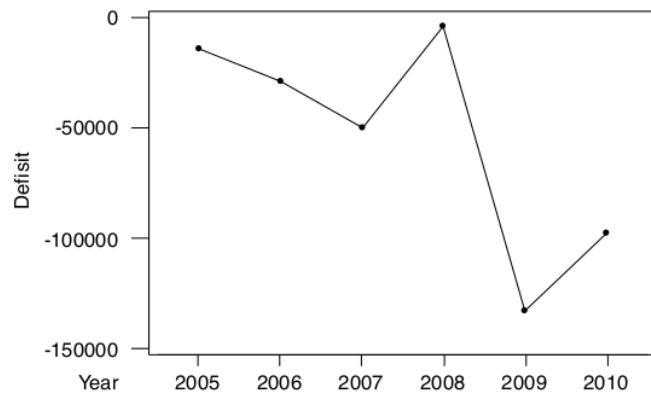
	2005	2006	2007	2008	2009		2010
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	RAPBN-P	RAPBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	495.224,20	637.987,20	707.806,10	981.609,40	985.725,30	872.631,80	911.475,80
I. Penerimaan Dalam Negeri	493.919,40	636.153,10	706.108,30	979.305,40	984.786,50	871.640,20	910.054,30
a. Pajak dalam Negeri	347.031,10	409.203,00	490.988,60	658.700,80	725.843,00	652.121,90	729.165,20
b. Pajak Perdagangan Internasional	331.791,90	395.971,50	470.051,80	622.358,70	697.347,00	632.098,80	702.033,90
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.239,20	13.231,50	20.936,80	36.342,10	28.496,00	20.023,10	27.131,40
II. Hibah	146.888,30	226.950,10	215.119,70	320.604,60	258.943,60	219.518,30	180.889,00
B. Belanja Negara	509.632,40	667.128,70	757.649,90	985.730,70	1.037.067,30	1.005.673,60	1.009.485,70
I. Belanja Pemerintah Pusat	361.155,20	440.032,00	504.623,30	693.355,90	716.376,40	696.101,40	699.688,10
1. K/L	120.823,00	216.094,70	225.014,20	262.003,30	322.317,40	316.989,00	327.556,90
2. Non K/L	240.332,20	223.937,30	279.609,10	431.352,70	394.059,00	379.112,40	372.131,20
II. Transfer Ke Daerah	150.463,90	226.179,90	253.263,20	292.433,50	320.691,00	309.572,30	309.797,60
1. Dana Perimbangan	143.221,30	222.130,60	243.967,20	278.714,70	296.952,40	285.317,20	292.979,60
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesu	7.242,60	4.049,30	9.296,00	13.718,80	23.738,60	24.255,10	16.818,00
III. Suspen	-1.986,70	916,8	-236,5	-58,7	0	0	0
C. Keseimbangan Primer	50.791,40	49.941,10	29.962,60	84.308,50	50.315,80	-22.991,00	17.584,70
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	-14.408,20	-29.141,50	-49.843,80	-4.121,30	-51.342,00	-133.041,80	-98.009,90
E. Pembiayaan (E.I + E.II)	11.121,20	29.415,60	42.456,50	84.071,70	51.342,00	133.041,80	98.009,90
I. Pembiayaan Dalam Negeri	21.393,20	55.982,10	69.032,30	102.477,60	60.790,30	144.820,90	107.891,40
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	-10.272,00	-26.566,50	-26.575,80	-18.405,90	-9.448,20	-11.779,10	-9.881,50
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	-3.287,00	274,1	-7.387,20	79.950,40	0	0	0

Sumber : BPS Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat memberi gambaran bahwa dari tahun ke tahun pemerintah telah memberlakukan defisit anggaran. Defisit anggaran ini dari tahun ke tahun meningkat sampai dengan tahun 2007, sebagai upaya untuk melakukan ekspansi ekonomi, yang kemudian terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2008 mengingat pada saat itu terjadi krisis global yang berimbas pada perekonomian Indonesia. Hal ini berdampak pada penyerapan anggaran kita.

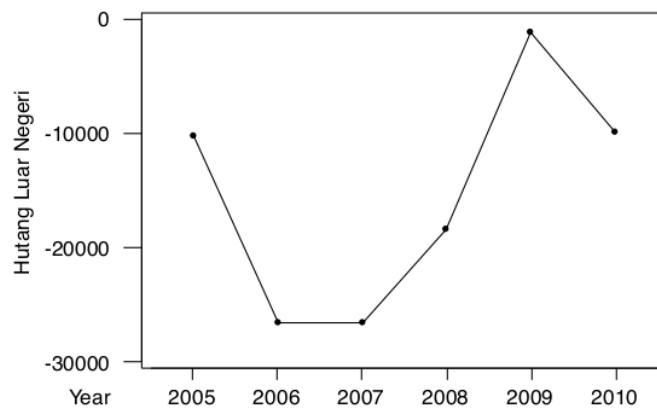
Pada tahun 2009 terjadi lonjakan defisit yang tinggi. Beberapa indikator penyebab defisit yang tinggi ini antara lain:

- Kebijakan pemerintah sebagai upaya stabilisasi ekonomi untuk mengatasi dampak krisis ekonomi global dengan pemberian subsidi dalam jumlah yang lebih besar, belanja pemerintah untuk sarana prasarana sebagai upaya untuk penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, maupun upaya pengentasan kemiskinan lainnya.
- Saat dimana diadaannya pemilihan umum yang berimplikasi pada penambahan belanja untuk pembiayaan pemilu. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan belanja salah sasaran sebagai upaya penggalangan dana untuk partai politik peserta pemilu.



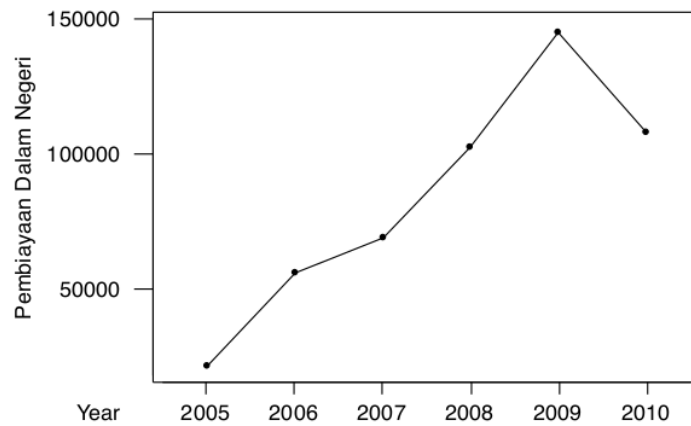
Grafik 1: Perkembangan Defisit Anggaran

Jika dilihat dari sisi pembiayaan defisit, maka dapat dibedakan antara pembiayaan dari luar negeri (hutang luar negeri) dan pembiayaan dari dalam negeri. Pembiayaan yang berasal dari luar negeri terlihat dari tahun ke tahun secara umum ada indikasi kenaikan. Lihatlah grafik di bawah ini.



Grafik 2: Pembiayaan Defisit Melalui Hutang Luar Negeri

Sedangkan di sisi lain pembiayaan defisit melalui hutang dalam negeri juga mengalami peningkatan. Tren peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan utang dari luar negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah berupaya mengalihkan alokasi utang, yang semula berorientasi ke luar negeri beralih ke dalam negeri.



Grafik 3: Pembiayaan Defisit Melalui Hutang Dalam Negeri

Untuk lebih memperjelas gambaran di atas maka perlu disajikan bagaimana perkembangan hutang pemerintah, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

**Perkembangan Utang Pemerintah
(Milyar US Dollar)**

Tahun	Utang Luar Negeri	Obligasi	Total Utang
2001	58,9	63,52	122,42
2002	63,74	73,3	137,04
2003	68,91	76,64	145,55
2004	68,59	71,29	139,88
2005	63,09	70,51	133,6
2006	62,02	82,34	144,36
2007	62,25	85,26	147,51
2008	66,69	82,78	149,47
2009	65,02	104,2	169,22
2010	66,58	118,72	185,3

Gambar 2 : Perkembangan Utang pemerintah

Kontribusi kenaikan total utang diatas terbesar dari penjualan obligasi pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat pembeli obligasi tersebut dapat meningkatkan kekayaannya melalui kepemilikan obligasi tersebut.

Di sisi lain henaknya kita melihat bagaimana rasio hutang terhadap pendapatan dan bukan hanya pada nilai absolute dari hutang itu, karena pendapatan (dalam hal ini GNP) merupakan ukuran dari besarnya perekonomian, dan dengan demikian rasio hutang terhadap GNP merupakan ukuran dari besarnya hutang relative terhadap besarnya perekonomian. Berikut ini adalah perkembangan besarnya total hutang pemerintah dan bunga dan rasionya terhadap GNP :

- Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
- Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
- Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
- Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
- Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
- Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
- Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
- Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
- Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
- Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
- Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
- Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
- November 2012: Rp 1.990,66 triliun (27,5%)

Sumber: Wahyu Daniel – detikfinance, 18/12/2012

Perkembangan rasio hutang terhadap pendapatan ini akan dipengaruhi oleh keterkaitan antara rasio tersebut dengan suku bunga riil dan laju pertumbuhan output. Semakin tinggi tingkat bunga dan semakin rendah laju pertumbuhan output, maka rasio hutang terhadap pendapatan akan cenderung meningkat. Begitu juga sebaliknya jika semakin rendah tingkat bunga dan semakin tinggi laju pertumbuhan output maka rasio hutang terhadap pendapatan akan cenderung menurun. Tampaknya itulah yang terjadi di Indonesia, yaitu trend suku bunga yang terus menurun, pertumbuhan output yang semakin tinggi dan rasio hutang terhadap pendapatan yang semakin menurun.

Tampaknya hutang merupakan beban berat bagi setiap individu, karena harus dibiayai oleh penerimaan pajak. Akan tetapi di sisi lain bahwa hutang yang ditanggung oleh setiap individu sebagai bagian dari beban nasional itu ada obligasi pemerintah yang dimiliki oleh masyarakat. Pada umumnya setiap individu menanggung beban hutang pemerintah, meskipun banyak pula individu yang mempunyai tagihan atas pemerintah yang merupakan sisi lain dari hutang nasional. Pajak yang akan dibayarkan oleh individu untuk melunasi hutang nasional tersebut juga akan berbeda antara individu satu dengan yang lainnya.

Penutup

Untuk menerapkan kebijakan perekonomian yang ekspansif rasanya sulit untuk tidak menjalankan kebijakan defisit anggaran. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap kebijakan defisit anggaran tersebut. Pembiayaan defisit anggaran dapat dilakukan melalui hutang luar negeri, penjualan surat utang atau obligasi, penciptaan uang ataupun dengan penjualan asset.

Pembiayaan defisit melalui utang luar negeri yang berlebihan akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan, karena akan semakin

besar prororsi penerimaan itu untuk melunasi hutang tersebut. Pembiayaan defisit melalui penjualan obligasi perlu mendapat perhatian karena walaupun utang pemerintah meningkat, tapi dari sisi lain kekayaan netto perekonomian juga meningkat karena akan semakin besar tagihan masyarakat terhadap negara, yang berarti kekayaan mereka juga meningkat, yang akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak. Pembiayaan berasal dari penciptaan uang perlu diwaspadai karena akan meningkatkan jumlah uang beredar yang berimbas pada kenaikan laju inflasi, yang justru akan menurunkan laju pertumbuhan.

Walaupun defisit anggaran susah dihindarkan, tetapi hendaknya anggaran yang ada lebih dialokasikan pada peningkatan output, yang berakibat pada meningkatnya pendapatan (GNP), sehingga rasio antara utang pemerintah dengan pendapatan semakin lama akan semakin menurun. Jika tidak maka rasio antara defisit anggaran dengan GNP semakin besar, yang berarti bahwa hutang yang didapat hanya akan digunakan untuk menutupi utang sebelumnya.

Daftar Pustaka

Anggraeni, Diana, Copyright (c) 2010 [DIANA'S BLOG](#).

David N., Hyman, *Public Finance*, Dryden Press, London, 1999, Hal. 446

Eisner, Robert. (1989). Budget Deficit: Rhetoric and Reality. *The Journal of Economic Perspectives*. Vol. 3 No. 2. American Economic Association.

Kunarjo, *Majalah Perencanaan Pembangunan*, Edisi 23 Th 2001

Mankiw, N. Gregory. (2007). *Macroeconomics*. Sixth Edition. Worth Publishers. New York.

Eisner, Robert. (1989). Budget Deficit: Rhetoric and Reality. *The Journal of Economic Perspectives*. Vol. 3 No. 2. American Economic Association.

Dornbusch, R., Fischer S, (1993), *Macroeconomics*, Departement of Economics, Massachusetts Institute of Technology

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DEFISIT ANGGARAN MELALUI UTANG PEMERINTAH

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	9%
2	www.kaskus.co.id Internet Source	3%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	repo.pusikom.com Internet Source	1%
5	www.oocities.org Internet Source	1%
6	mudaoptimis.wordpress.com Internet Source	1%
7	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
8	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1%
9	ardra.biz Internet Source	<1%

10	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
11	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
12	echa-chaspotgila.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	studylib.net Internet Source	<1 %
14	www.metrosiantar.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On